PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI) DI SUMATERA BARAT TAHUN 1948 - 1949

Deden Usmaya, Wakidi dan Syaiful M

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Phone (0721) 704 947, faximile (0721) 704 624

e-mail:Deden_usmaya@yahoo.com

HP. 085768846457

The purpose of this research is to know the implementation of the Emergency Government of Republic Indonesia in the politic, defense and security side. The method used in this research is the historical method. The results from this research showed that during the Emergency Government of Republic Indonesia, the executive, legislative, judicial and security defense led was by Sjafrudin Prawiranegara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam bidang politik dan pertahanan keamanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, eksekutif, legislatif, yudikatif dan pertahanan keamanan dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara.

Kata kunci : darurat, pemerintahan, pertahanan

PENDAHULUAN

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang baru merdeka tentunya memerlukan perlengkapan dan atribut kenegaraan. Dalam hal ini Indonesia terus berupaya memenuhi perlengkapan kenegaraan yang dibutuhkan seperti Presiden, Wakil Presiden, Konstitusi, Dasar Negara dan kelengkapan negara lainnya. Oleh karena itu pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) langsung mengadakan sidang yang pertama kali setelah Indonesia merdeka yang menghasilkan beberapa hal penting antara lain penetapan Sukarno sebagai Presiden dan Muhamad Hatta sebagai Wakil Presiden serta penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara (Shodiq Mustafa, 2007 : 10). Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan siding lanjutan yang menghasilkan beberapa keputusan

diantaranya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) (Shodiq Mustafa, 2007 : 13). Dengan begitu bahwa perlengkapan Negara sudah lengkap mulai dari Presiden, Wakil Presiden, KNI merupakan lembaga yang bertugas sebelum DPR/MPR terbentuk, serta adanya Badan Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Meskipun Indonesia telah secara resmi merdeka akan tetapi Belanda dan sekutu masih menganggap Indonesia belum merdeka dan ingin menguasai kembali Indonesia. Tentara sekutu dan Belanda datang kembali ke Indonesia dengan alasan pemulihan keamanan.“ Kedatangan tentara sekutu ini mendapat reaksi keras dan penolakan dari bangsa Indonesia. Para pemuda dan pejuang didaerah mengadakan perlawanan perlawanan seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali dan beberapa

daerah lainnya ” (Shodiq Mustafa, 2007 : 40).

Periode tahun 1945 – 1950 biasa disebut masa Revolusi Nasional. Perang dengan taktik gerilya digunakan oleh pejuang Indonesia dalam menghadapi Belanda. Selain perlawanan melalui peperangan, perlawanan juga dilakukan melalui perundingan dan diplomasi. Perundingan tersebut antara lain perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville dan masih banyak perundingan lainnya yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Perundingan demi perundingan telah dilakukan, tetapi tidak pernah membuahkan hasil, Belanda selalu mengkhianati perjanjian yang telah disepakati. Seperti Perjanjian Linggarjati yang dikhianati dengan melakukan Agresi Militer Belanda I, kemudian Perjanjian Renville yang dikhianati dengan melakukan Agresi Militer Belanda II.

Pada tahun 1948, Yogyakarta merupakan ibukota negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga menjadi tujuan utama Agresi Militer Belanda II. Akibat Agresi Militer Belanda II Yogyakarta berhasil direbut dan dikuasai oleh Belanda. Selain itu juga Belanda menahan dan mengasingkan tokoh nasional seperti Sukarno dan Muhammad Hatta (Anthony J.S Reid, 1996 : 263). Belanda merasa senang karena telah menguasai ibukota negara dan telah menangkap orang yang sangat berpengaruh di Indonesia yaitu Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, akan tetapi sebelum Belanda menguasai Kota Yogyakarta dan menangkap Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, telah mengadakan rapat kabinet yang intinya adalah memberikan mandat kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara untuk segera membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat, dan kepada Mr. A.A Maramis di India apabila gagal dibentuk di Sumatera .

Kota Bukit Tinggi dipilih sebagai pusat dan ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) karena telah dipersiapkan pemerintah untuk dijadikan ibukota pemerintahan apabila terjadi serangan militer Belanda. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemerintah telah membuat antisipasi yang menduga bahwa Belanda akan melakukan Agresi Militer Belanda II.

Pemimpin Republik yang di Jawa telah menduga kemungkinan Agresi Militer Belanda II dan telah membuat rencana menghadapi kemungkinan itu, pada bulan November 1948 Wakil Presiden Muhammad Hatta mengajak Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia ke Bukit Tinggi dan ketika Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta, Mr. Sjafrudin Prawiranegara tetap tinggal untuk mempersiapkan kemungkinan pembentukan sebuah Pemerintahan Darurat di Sumatera seandainya ibukota Republik di Jawa jatuh ke tangan Belanda (Audrey Kahin, 2005 : 211).

Dengan demikian roda pemerintahan terus berjalan walaupun hanya Pemerintahan Darurat. Selain itu juga perlawanan dengan senjata terus dilakukan melalui strategi perang gerilya dengan memasuki hutan, gunung dan berpindah pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada awalnya akan dipimpin oleh Muhammad Hatta dan tugas Mr. Sjafrudin Prawiranegara ketika itu adalah hanya mempersiapkan dan setelah dipersiapkan dengan baik, kemudian Muhammad Hatta akan berangkat ke Bukit Tinggi. Pada Pertengahan bulan Desember 1948 Perdana Menteri Negara India, Jawarharlal Nehru mengirim sebuah pesawat untuk membawa Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke luar Jawa, dalam perjalanan ke luar negeri pesawat itu singgah di Bukit Tinggi disini Muhammad Hatta akan tinggal

untuk mengespalai pemerintahan Darurat, sementara Sukarno terbang ke New Delhi (Audrey Kahin , 2005 : 211).

Sukarno dan Muhamad Hatta gagal berangkat karena sebelum pesawat itu mendarat di Jawa, Belanda sudah melakukan Agresi Militer pada tanggal 19 Desember 1948. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia memegang kendali pemerintahan selama 7 bulan yaitu dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Meskipun Pemerintahan Darurat Republik Indonesia(PDRI) hanya bekerja selama 7 bulan tetapi telah menyelamatkan pemerintahan negara Indonesia dari kehancuran akibat terjadinya Agresi Militer Belanda II.

METODE PENELITIAN

Keberhasilan suatu penelitian banyak dipengaruhi oleh pemakaian metode, maka dari itu seorang peneliti harus dapat memilih metode yang tepat dan sesuai. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. dengan berusaha mencari gambaran menyeluruh tentang data, fakta dan peristiwa yang sebenarnya mengenai pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Di Bukit Tinggi Sumatera Barat Tahun 1948 – 1949.

Pengertian metode historis menurut Nugroho Notosusanto adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang digunakan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya (Nugroho Notosusanto, 1984 : 10-11). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode historis adalah suatu cara di dalam proses pengujian dan analisis data yang sudah terkumpul untuk dijadikan bahan sejarah yang tertulis.

Adapun langkah-langkah dalam penulisan historis yaitu :

1. Heuristik, adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah.

2. Kritik, yaitu menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah itu asli, baik isi maupun bentuknya.

3. Interpretasi, yaitu setelah memperoleh fakta yang diperlukan, maka kita harus merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal.

4. Historiografi, yaitu merupakan kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian (Nugroho Notosusanto, 1984 : 36).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik kepustakaan, “ Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan misalnya Koran, majalah-majalah, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian”(Koentjaningrat, 1983 : 81).

Dengan teknik kepustakaan, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah buku-buku untuk memperoleh data-data dan informasi berupa teori-teori atau argument-argumen yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah teknik dokumentasi, teknik dokumentasi adalah suatu teknik mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1986 : 188). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data masa lampau dan data masa sekarang, sebab bahan-bahan dokumentasi mempunyai arti metodologis yang sangat penting dalam penelitian masyarakat yang mengambil orientasi histories. Data-datanya berasal dari sumber-sumber informasi berupa buku-buku referensi, surat kabar atau majalah dan foto-foto yang relevan.

Setelah data penelitian diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data

untuk diinterpretasikan dalam menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan hal yang sangat penting karena data yang sudah diperoleh akan lebih memiliki arti bila telah dianalisis. Menurut Hadari Nawawi, analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya. (Hadari Nawawi, 1993 : 174).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Propinsi Sumatera Barat terletak di Pantai Barat pulau Sumatera. Luasnya kurang lebih 4.229.730 m². Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Padang. Batas-batas Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu
Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Riau (Depdikbud, 1998:11).

Secara geografis Sumatera Barat merupakan dataran tinggi dengan beberapa gunung berapinya yang masih aktif. Daerah pegunungan itu sendiri merupakan rangkaian dari pegunungan Bukit Barisan. Beberapa gunung yang terdapat di Sumatera Barat antara lain gunung Marapi, Singgalang, Sago, Talang dan Pasaman. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang dilalui garis Khatulistiwa, pada umumnya daerah yang dilalui garis Khatulistiwa adalah beriklim tropis. Seperti umumnya daerah tropis, wilayah Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Tinggi rendahnya curah hujan di setiap daerah sangat bervariasi. Di Sumatera Barat sendiri curah hujannya relatif tinggi.

Hampir seluruh wilayah Sumatera Barat dihuni oleh suku Minangkabau. Suku Minangkabau menganut garis keturunan ibu atau Matrilineal. Matrilineal adalah prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat wanita. Dalam masyarakat Minangkabau tidak ada golongan yang menumpang. Kedudukan mereka adalah sama rata dan bersama-sama dalam suatu badan persekutuan teritorial. Persekutuan teritorial sering disebut juga Nagari. Setiap nagari memiliki wilayah sendiri dengan batas-batas geografis yang jelas dan mempunyai balai adat nagari, masjid, jalan raya, tepian tempat mandi, dan alun-alun. Stratifikasi sosial dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat digambarkan secara umum dan menyeluruh, karena pada kenyataannya stratifikasi sosial itu hanya berlaku dalam kesatuan sebuah Nagari tertentu saja.

Pada awal perkembangan pemerintahan di Sumatera, Sumatera Barat merupakan wilayah yang berada di Propinsi Sumatera Tengah. Setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949 Propinsi Sumatera dimekarkan menjadi tiga Propinsi, yaitu Propinsi Sumatera Tengah, Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Selatan. Setelah adanya pemekaran tersebut keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau ikut ke dalam Provinsi Sumatera Tengah. Ibukota Propinsi Sumatera Tengah adalah Bukit Tinggi (Depdikbud, 1998 :28). Secara Administratif wilayah keresidenan Sumatera Barat terdiri dari empat Afdeling (Setingkat kabupaten) dan dua Staadgemeente (Kotamadya) yaitu :

1. Afdeling Zuil Benedenlanden
2. Afdeling Tanah Datar
3. Afdeling Lima Puluh Kota
4. Afdeling Solok
5. Staadgemeente Padang
6. Staadgemeente Fort de Kock

Setelah Indonesia merdeka terjadi pemekaran Keresidenan, Sumatera Barat berubah menjadi Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Padang. Di Provinsi Sumatera Barat terdapat delapan Kabupaten dan Enam Kotamadya.

Adapun delapan Kabupaten tersebut adalah:

1. Kabupaten Tanah Datar
2. Kabupaten Agam
3. Kabupaten Limapuluh Kota
4. Kabupaten Solok
5. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
6. Kabupaten Pasaman
7. Kabupaten Padang Pariaman
8. Kabupaten Pesisir Selatan

Sementara enam Kotamadya nya adalah sebagai berikut:

1. Kotamadya Padang
2. Kotamadya Bukit Tinggi
3. Kotamadya Payakumbuh
4. Kotamadya Solok
5. Kotamadya Sawahlunto
6. Kotamadya Padang Panjang
(Depdikbud, 1998 : 28).

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk karena mandat Presiden Sukarno yang diberikan kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara, mandat tersebut adalah :

Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi Belanda telah mulai serangan atas ibukota Yogyakarta, jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi kami menguasai kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.

Selain mandat kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara, mandat juga diberikan kepada Mr. A.A Maramis untuk membentuk pemerintahan darurat di New Delhi apabila pemerintahan darurat gagal dibentuk di Sumatera. Mandat tersebut adalah :

Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari minggu

tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi Belanda telah mulai serangan atas ibukota Yogyakarta, jika ihtiar Mr. Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan tidak berhasil kepada saudara – saudara dikuasakan untuk membentuk exile pemerintahan di India. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Sjafrudin Prawiranegara di Sumatera. Jika hubungan tidak mungkin harap diambil tindakan – tindakan seperlunya.

Sejak terjadinya Revolusi Nasional kota kota di Sumatera Barat sudah menjadi daerah yang mulai diawasi perkembangannya oleh pemerintah pusat di Jawa, hal ini terjadi karena daerah Sumatera sangat baik untuk menjalankan pemerintahan. “Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I daerah kekuasaan Republik di Jawa menjadi semakin kecil dan pemerintahan Republik yang berkedudukan di Yogyakarta mulai melihat ke Sumatera sebagai daerah tempat mundur yang potensial seandainya Belanda berhasil menguasai pusat pusat Republik di Jawa (Audrey Kahin, 2005 : 192).

Sebelum terjadi Agresi Militer Belanda II, pemerintah telah bersiap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya serangan militer dari Belanda. Pemimpin Republik di Jawa telah menduga kemungkinan Agresi Militer Belanda II dan telah membuat rencana menghadapi kemungkinan itu, pada bulan November 1948 Wakil Presiden, Muhamad Hatta mengajak Menteri Kemakmuran, Mr. Sjafrudin Prawiranegara ke Bukit Tinggi. Dan ketika Muhamad Hatta kembali ke Yogyakarta, Mr. Sjafrudin Prawiranegara tetap tinggal di Bukit Tinggi untuk mempersiapkan kemungkinan pembentukan sebuah pemerintahan darurat di Sumatera seandainya ibukota Republik di Jawa jatuh ke tangan Belanda (Audrey Kahin, 2005 : 211).

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) diumumkan secara resmi melalui radio milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI).

Pemerintahan sendiri baru terbentuk pada tanggal 19 Desember 1948 dan secara resmi menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 1948. Peresmian tersebut dilaksanakan di Halaban dekat Kabupaten Payakumbuh. Pembentukan Pemerintahan Darurat baru dapat diumumkan ke seluruh penjuru tanah air pada tanggal 23 Desember 1948 melalui radio Tamimi di Halaban yang tersambung dengan radio AURI yang ada di Jawa maupun daerah daerah lainnya (Depdikbud, 1998 : 56).

Mr.Sjafrudin Prawiranegara segera menyusun strategi untuk menghadapi serangan Belanda dan yakin bahwa pada saat itu pemimpin pemimpin Republik yang ada di Jawa telah ditahan Belanda. Maka terbentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Setelah dibentuk secara resmi pada tanggal 22 Desember 1948 Mr.Sjafrudin Prawiranegara kemudian menunjuk beberapa orang untuk dijadikan Menteri.

Pada tanggal 22 Desember 1948 Sjafrudin Prawiranegara mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Mr. Sjafrudin Prawiranegara sendiri sebagai Ketua, Gubernur Sumatera Mr.Tengku Muhammad Hasan sebagai wakil ketua dan Mr.Rasyid sebagai Menteri Keamanan. Kabinet mengangkat panglima Angkatan Darat, Laut dan Udara kemudian menunjuk perwakilan Republik Indonesia di India Mr. A.A Maramis sebagai menteri luar negeri dan menugaskannya agar membawa masalah Indonesia ke PBB, dan menunjuk perwakilan PDRI di Jawa di bawah pimpinan Sukiman, Kasimo dan Mr.Susanto semuanya itu adalah menteri dalam kabinet Hatta yang luput dari penangkapan Belanda ketika mereka menyerang Yogyakarta (Audrey Kahin, 2005 : 213).

Setelah berbicara jarak jauh, maka pada 31 Maret 1949 Mr. Sjafrudin Prawiranegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Kabinet pemerintahan darurat diberi nama Kabinet Darurat.

Adapun susunan Kabinet Darurat adalah :

1. Ketua : Mr.Sjafrudin Prawiranegara
2. Menteri Kehakiman : Susanto Tirtoprojo
3. Menteri Luar Negeri : AA Maramis
4. Menteri Keuangan : Lukman Hakim
5. Menteri Kesehatan : Sukiman
6. Menteri Kemakmuran : Ij Kasimo
7. Menteri Agama : Masjkur
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Teuku Muhammad Hassan
9. Menteri Perhubungan : Indratjahja (Fidelara, 2010 : 30).

Kemudian ditunjuk pejabat Militer yaitu :

1. Letnan Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI.
2. Kolonel Abdul Haris Nasution, Panglima Tentara & Teritorium Jawa.
3. Kolonel R. Hidajat Martaatmadja, Panglima Tentara & Teritorium Sumatera.
4. Kolonel Mohammad Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut.
5. Komodor Udara Hubertus Suyono, Kepala Staf Angkatan Udara.
6. Komisaris Besar Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara.

Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam bidang politik maka tidak terlepas dari kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan. Mr.Sjafrudin Prawiranegara menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan cara diam diam dan berpindah pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hal ini dilakukan untuk menghindari serangan pasukan militer Belanda. Dengan adanya PDRI perjuangan gerilya dan perjuangan politik tetap bisa dilaksanakan, karena PDRI menjadi pemersatu dari semua perjuangan yang dilakukan.

PDRI memainkan peranan penting dan menjamin bahwa perjuangan melawan Belanda tetap dipimpin oleh pemerintahan yang sah yang diakui oleh kaum Republik di seluruh Nusantara.

PDRl merupakan simbol nasional dan faktor pemersatu khususnya pasukan gerilya yang terpecah diseluruh wilayah Jawa dan Sumatera, karena pemerintahan Sjafrudin Prawiranegara diakui oleh pasukan Republik dibawah panglima besar Sudirman (Audrey Kahin, 2005 : 213).

Tindakan yang dilakukan Mr. Sjafrudin Prawiranegara mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat. Apalagi setelah Pemerintahan Darurat di bawah pimpinan Mr. Sjafrudin Prawiranegara terus menerus mendatangi desa - desa dan memberikan penerangan serta dorongan semangat kepada mereka, penduduk desa pun membalas perhatian pemimpinnya dengan mendukung terus perjuangan dengan cara mereka antara lain dengan memberikan makanan (Depdikbud, 1998 : 106).

Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Mr. Sjafrudin Prawiranegara dan jajarannya dengan melakukan kegiatan pemerintahan secara berpindah pindah dan kunjungan ke beberapa Nagari di Sumatera Barat merupakan kegiatan politik yang dilakukan Pemerintah (PDRl) dalam rangka memberikan dukungan moral dan menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah selalu dekat dengan Rakyat. Rakyat akan lebih nyaman, aman dan terlindungi karena dekat dengan Pemerintah. Begitu juga dengan pemerintah dapat melihat keadaan rakyat dan mendengar langsung kemauan rakyat pada saat keadaan darurat (perang).

Pada tanggal 23 Desember 1948 Mr. Sjafrudin Prawiranegara menyampaikan pidato yang intinya adalah mengecam tindakan pasukan Belanda yang telah menyerang Indonesia serta menunjukkan kepada Belanda bahwa pemerintahan Indonesia masih tetap ada dan memberikan semangat kepada Tentara Nasional Indonesia agar tetap berjuang melawan Belanda. Tetapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-

pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung kepada Sukarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin.

Berdasarkan pidato tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Belanda telah menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia sudah tidak ada karena Sukarno dan Muhamad Hatta telah ditangkap tetapi anggapan Belanda tersebut ternyata salah karena Pemerintahan Indonesia masih ada yang dipimpin oleh Mr.Sjafrudin Prawiranegara, kemudian kepala Pemerintahan Mr.Sjafrudin Prawiranegara juga memberikan instruksi kepada tentara agar tetap melakukan serangan terhadap Belanda. Di daerah - daerah yang dikunjungi Mr. Sjafrudin Prawiranegara dan Kolonel Hidayat seperti di Sumatera Barat, Tapanuli dan Aceh mereka dapat memainkan peranan koordinasi dan peranan Simbolis. “ Zaman gerilya yang secara formal dibawah PDRl adalah saat terkaburnya segala batas, militer memegang jabatan sipil dan sipil menjadi penguasa militer, menteri menteri saling mengisi jabatan dan kekaburan ini bukanlah anarki tetapi memikul tanggung jawab bersama demi cita cita bersama” (Audrey Kahin, 2005 : 41).

Sementara itu untuk melakukan perhubungan dengan Pemerintahan di Jawa , Mr.Sjafrudin Prawiranegara telah melakukan upaya dengan membentuk komisariat Pemerintahan Darurat. “Menteri menteri yang sisa, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Kasimo, dan K.H Masjkur ditunjuk memimpin Komisariat Pemerintahan Darurat bagi Jawa ketika Mr.Sjafrudin pada akhirnya membuat kontak dengan mereka pada bulan Mei 1949, sementara itu mereka sendiri bertindak sebagai propagandis dan kadang

kadang sebagai penasihat bagi pihak tentara dan bukan sebagai pemimpin (Anthony J.S Reid, 1996 : 267).

Dalam menjalankan Pemerintahan Mr.Sjafrudin Prawiranegara dan Jajarannya memiliki sebuah alat komunikasi yang dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Diperengkapi dengan sebuah Transmitter Radio yang kuat, pemerintahan Sjafrudin mengadakan hubungan dengan Singapura dan secara berangsur angsur juga dengan beberapa pusat gerilya di Jawa (Anthoni J.S Reid, 1996 : 267).

Hal tersebut tidak terlepas dari peran AURI , Dalam menjalankan kegiatan Pemerintahan dan hubungan dengan beberapa daerah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia banyak dibantu oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Peran AURI ketika itu adalah membantu Sjafrudin Prawiranegara dalam berkomunikasi melalui radio karena AURI telah menyediakan radio yang dipersiapkan dengan baik yang dapat berhubungan dengan beberapa daerah lainnya. Kepala Staf AURI Komodor H. Soejono memerintahkan penyelamatan dua Stasiun Radio PHB AURI dengan membawanya ke Halaban ,Payakumbuh Selatan dan Piobang, Stasiun Radio tersebut adalah Stasiun Radio di bawah Opsir Udara III Luhukay dan Stasiun Radio di bawah Opsir Udara III M.S. Tamimi, artinya dalam melaksanakan Pemerintahan, Mr.Sjafrudin Prawiranegara dilakukan dengan hubungan jarak jauh serta dengan cara berpindah pindah. Mr. T.M Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI, merangkap Menteri Dalam Negeri, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, menuturkannya bahwa rombongan mereka kerap tidur di hutan belukar, di pinggir sungai Batanghari, dan sangat kekurangan bahan makanan. Mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain. Kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan itu diejek radio Belanda sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia.

Pertahanan dan perlawanan terhadap Belanda digerakkan dari pedalaman secara gerilya, markas TNI pun diungsikan ke pedalaman dan berpindah pindah bersaman PDRI dengan pemerintah Militernya. Pemerintah Militer untuk daerah Sumatera Barat ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1948 dan sebagai Gubernur Militernya adalah Mr. Muhamad Rasyid kemudian sebagai pertimbangan mengapa Sumatera Barat dijadikan daerah militer dikemukakan karena kita dalam keadaan perang sehingga berada dalam keadaan perang sehingga untuk menjamin efektifitas perjuangan pemimpin dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tegas terutama mengenai pertahanan (Sardjono dan GH Marsadji, 1982 : 82).

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) telah membentuk program kerja dalam bidang pertahanan keamanan. Program kerja dalam bidang pertahanan keamanan ini adalah sebuah usaha untuk melawan dan menanggulangi serangan pasukan Belanda.

Program kerja dalam bidang pertahanan keamanan antara lain :

1. Pembentukan Daerah Sub Komando A Daerah Sub Komando A meliputi wilayah Padang Pariaman. Pasukan TNI yang beroperasi di daerah Padang Pariaman adalah Kompi Bakapak yang dipimpin oleh Muhamad Noer, Kompi Bakipek yang dipimpin oleh Zaidin Bahry, Kompi Yager dibawah pimpinan Yusuf Siraj, ALRI , BPNK (Depdikbud, 1998 : 90).
2. Pembentukan Daerah Sub Komando B Daerah Sub Komando B meliputi wilayah Solok Utara, Solok Selatan, Sawah Lunto, dan Alahan Panjang. Seperti di Daerah Sub Komando A , Sub Komando B juga dibagi atas beberapa pasukan dan Operasi Gerilya. Solok Utara menjadi tanggung jawab pasukan Letda Bachtiar yang terdiri atas pasukan Rabain, Pasukan Nawu dan Pasukan Rosmen. Solok Selatan menjadi tanggung jawab Letda Yusuf Usman

dan Letda Idris. Sawah Lunto menjadi daerah Operasi Gerilya pasukan yang dipimpin Letnan Syofyan Tamala. Alahan Panjang komandannya adalah Lettu Arief Amin (Depdikbud, 1998 : 91). Dengan pembagian pasukan yang merata di setiap daerah operasi gerilya akan mempersempit pergerakan pasukan Belanda yang berada di wilayah Solok, Sawah Lunto dan Alahan Panjang.

3. Pembentukan Daerah Sub Komando C Daerah Sub Komando C dibagi atas tiga sektor

Sektor pertempuran Kerinci dibawah pimpinan Letda Murady, Sektor pertempuran Inderapura dibawah pimpinan Letda Imran, Sektor pertempuran Painan dibawah pimpinan Lettu Mugni Zein (Depdikbud, 1998 : 93).

Daerah sub komando C merupakan daerah sub komando yang memiliki daerah operasi gerilya paling sedikit dibandingkan daerah sub komando A dan daerah sub komando B. Daerah Sub Komando C juga adalah Daerah Sub Komando terakhir yang dibentuk.

4. Mengatur Pertahanan Rakyat Semesta Pertahanan Rakyat Semesta merupakan pertahanan yang diselenggarakan oleh Komando satuan dari tingkat paling bawah yang bekerja bersama Rakyat. Yang aktif bertindak adalah para Komandan Brigade dan Komandan Resimen yang berkoordinasi dan mengawasi mereka, kemudian yang lebih penting lagi adalah menyelenggarakan perhubungan satu sama lain, Panglima Gubernur dan Gubernur Militer dengan Gubernur Sipil merancang rencana untuk fase fase selanjutnya sambil memelihara semangat bawahan dan rakyat umumnya (A.H Nasution, 1979 : 274). Pembentukan pertahanan rakyat semesta tersebut merupakan langkah yang sangat baik, mengingat bahwa dalam perang menghadapi Belanda harus memerlukan bantuan

dan dukungan dari rakyat. Dalam Pertahanan Rakyat Semesta melibatkan seluruh pasukan TNI sebagai kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung.

5. Pembentukan Basis Gerilya Perang Gerilya yang dilaksanakan di Sumatera Barat tidak terlepas dari peranan Desa atau Nagari. Pasukan Keamanan setingkat Desa disebut dengan Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) dan Pasukan Mobil Teras (PMT) yang merupakan pasukan elit yang direkrut dari BPNK yang berada dibawah komando wali nagari dan camat (Depdikbud, 1998 : 104). Dengan demikian terjadilah pemerataan persebaran pasukan TNI diseluruh Desa atau Nagari. Sebagai akibatnya medan pertempuran TNI meluas ke seluruh daerah di Sumatera Barat. Desa atau Nagari dijadikan sebagai Basis Gerilya karena dukungan masyarakat desa kepada Pasukan Republik yang sangat baik serta kondisi daerah yang sangat sulit ditembus oleh Pasukan Belanda. Partisipasi Petani di pedesaan dalam membiayai perjuangan ini tercermin dalam kesepakatan mereka untuk memberikan iuran perang. Pemungutan tersebut dilakukan oleh satu penitia Nagari. Rakyat merasa telah membantu kerabatnya yang berjuang demi kemerdekaan mereka rela memberikan semua kebutuhan untuk perang demi Revolusi. Pada umumnya TNI melakukan serangan serangan Gerilya pada malam hari dan ditunjukkan langsung terhadap pos pos Belanda, pada siang hari pasukan Belanda selalu mengadakan patroli disaat itu pasukan TNI bersembunyi di tempat tempat tertentu (Nagari) atau kembali sebagai rakyat biasa yang melakukan pekerjaan sehari hari (Depdikbud, 1998 : 105). Pembentukan basis gerilya dilaksanakan di desa karena untuk mempersulit gerak pasukan Belanda

dalam melakukan serangan dan lebih mendekatkan antara rakyat dengan pejuang.

6. Pembentukan Jaringan Pertahanan Logistik

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia ketika melaksanakan gerilya maka dibentuklah pertahanan logistik yang bertugas menyediakan bahan makanan dan keperluan perang lainnya. Pasukan TNI yang tercerai berai banyak dibantu oleh BPNK yang membuat pertahanan yang kuat di nagari nagari, untuk memperkuat pertahanan keamanan di pedalaman disamping didirikan dapur dapur umum, alim ulama, cerdik pandai dan penghulu yang merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat dipergunakan untuk membiayai perang (Depdikbud, 1998 : 109).

Peran rakyat pun sangat baik dalam mendukung perjuangan yang dilakukan oleh TNI, langkah yang dilakukan oleh rakyat antara lain dalam penyediaan makanan yang dilakukan secara tersembunyi. Sebagian rakyat menyerahkan bantuan tidak hanya 10 % saja, bahkan apa yang ada semua diserahkan untuk keperluan perang. Pada beberapa tempat ditengah tengah rumah kosong telah tersedia makanan dalam bentuk ubi rebus, jagung rebus, dan lain lainnya yang disiapkan penghuninya pada waktu malam hari sedangkan pada siang hari mereka pergi mengungsi, makanan itu disediakan untuk para pejuang yang lewat (Depdikbud, 1998 : 110).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pembentukan jaringan logistik sangat didukung oleh rakyat. Dalam sistem pertahanan rakyat semesta rakyat merupakan komponen pendukung. Komponen pendukung sangat dibutuhkan dalam pertahanan keamanan negara.

7. Pertahanan Keamanan Internal

Semua pemuda yang berumur antara 17 sampai dengan 35 tahun yang tidak

menjadi anggota laskar partai harus masuk badan ini, disitu mereka akan memperoleh latihan militer dari opsir tentara reguler, BPNK menjadi tempat berkumpulnya pemuda yang diberhentikan dari tentara dapat memainkan peranan aktif dalam mempersiapkan pertahanan setempat mereka (Audrey Kahin, 2005 : 223). Tugas utama Badan Pengamanan Nagari dan Kota adalah untuk menjaga keamanan Nagari, siap menghadapi serangan Belanda, mengatur pemuda mengumpulkan dan membawa perbekalan untuk tentara dan menyelidiki musuh dari dalam dan luar kota. BPNK tidak hanya bertindak sebagai barisan keamanan karena juga mempunyai unsur jaringan komunikasi diseluruh wilayah. Pada saat pasukan TNI dan Rakyat berjuang melawan Belanda, Belanda ternyata mengalami ketidak sanggupaan dalam melawan TNI dan rakyat yang berjuang dengan semangat yang tinggi dan melakukan gerilya. "Kegigihan orang Republikan di Sumatera Barat dan beberapa daerah lainnya dan ketidak sanggupaan pasukan Belanda mengatur kekuasaan mereka di daerah yang telah mereka duduki dengan kekuatan militer memaksa mereka mencari jalan lain.

Pada tanggal 13 - 17 Mei 1949 PDRI mengadakan sidang Paripurna, Sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai, Sumpur Kudus di daerah Ampalu. Di tempat itu berkumpul semua anggota Kabinet PDRI yang berada di Bidar Alam dan Koto Tinggi, untuk membicarakan reaksi PDRI terhadap prakarsa perundingan yang dilakukan oleh para pemimpin yang ditawan di Bangka (Pimpinan Soekarno Hatta). PDRI mengeluarkan pernyataan yang menolak prakarsa perundingan kelompok Bangka. Pemimpin sipil dan pemimpin militer sangat mencurigai maksud Belanda, yakni bahwa Belanda hanya mau berunding sewaktu Belanda mendapat tekanan dan segera sesudah Belanda memperkuat posisi militer Belanda akan kembali mengangkat senjata. Para pemimpin tersebut

mengambil contoh pada saat disetujui dan dibatalkannya persetujuan Linggajati dan persetujuan Renville oleh Belanda.

Hasil persetujuan Roem – Royen pada tanggal 22 Juni 1949, Belanda mengizinkan pemimpin Republik untuk kembali ke Yogyakarta. Berita penghentian tembak menembak dari Yogyakarta didengar oleh PDRI dengan perantara radio. Muhamad Hatta langsung berangkat ke Aceh untuk menemui pemerintah darurat, akan tetapi karena PDRI berada di Sumatera Tengah khususnya di Sumatera Barat akhirnya Pemerintah mengutus delegasi untuk berangkat ke Sumatera Barat. Pemerintah dari Yogyakarta mengutus satu delegasi yang terdiri dari Muhamad Natsir, Dr. Leimena, Dr. Halim, dan Agus Yasman (Depdikbud, 1998 : 117).

Mendengar laporan radio akan ada kunjungan, Sjafrudin Prawiranegara dan kawan kawannya berjalan kaki ke utara dari tempat persembunyiannya di perbatasan Jambi. Ketika Natsir dan rombongan nya tiba di Bukit Tinggi mereka menerima instruksi dari radio PDRI untuk terus ke Payakumbuh dan dibawah genjatan senjata Lokal. Utusan PDRI menemui mereka dan membawa mereka ke sebuah kampung kecil (Audrey Kahin, 2005 : 238).

Berpidato dihadapan ratusan orang yang datang untuk mendengarkannya, Sjafrudin Prawiranegara mengatakan kepada mereka bahwa dari pada membuat perpecahan dalam satu masalah lebih baik menerima sebuah persetujuan yang tidak seperti diharapkan dan tetap bersatu. Mr. Sjafrudin Prawiranegara setuju kembali ke Jawa meninggalkan Sumatera Barat dan mengembalikan mandatnya kepada pemerintah pada tanggal 13 Juli 1949, Maka sejak itulah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berakhir dan kembali menjadi Pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di berakhir dengan dikembalikannya mandat kepada Sukarno.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada hasil dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi Sumatera Barat tahun 1948 – 1949 diawali dengan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dilaksanakan di Sumatera Barat padatahun 1948, Kemudian dalam bidang politik yang berhasil melaksanakan Pemerintahan dengan membentuk kabinet pemerintahan. Kabinet Pemerintahan ini diberinama kabinet Darurat. Kabinet Darurat terdiri dari beberapa menteri yang dipimpin langsung oleh Mr. Sjafrudin Prawiranegara.

Kabinet Darurat ini yang menjalankan fungsi Pemerintahan. Setelah dibentuk Kabinet Darurat membentuk Program kerja. Program kerja Kabinet Darurat adalah menyelamatkan Pemerintahan Indonesia dari kehancuran akibat terjadinya Agresi Militer Belanda II. Kegiatan dalam politik dan pemerintahan Mr. Sjafrudin Prawiranegara menjalankannya secara berpindah - pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hal ini dilakukan untuk menghindari serangan pasukan Belanda. Program kerja dalam bidang Pertahanan Keamanan yang berhasil dibentuk adalah Daerah sub komando, pembentukan basis gerilya, pembentukan jaringan logistik, pertahanan keamanan internal dan pertahanan rakyat semesta. Program kerja ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dengan Tentara Nasional Indonesia. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Barat berakhir dengan dikembalikannya mandat dari Mr.Sjafrudin Prawiranegara kepada Sukarno pada tanggal 13 Juli 1949 di ibukota negara, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian Praktek*. Jakarta : Bina Aksara.

- Depdikbud. 1998. *Peranan Desa Dalam Perjuangan Sumatera Barat 1945 sampai 1949*. Jakarta : Depdikbud.
- Fidelara. 2010. *Sejarah Kabinet Kabinet Indonesia modern*. Jakarta : Kemdiknas.
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926 sampai 1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Gramedia.
- Mustafa, Shodiq. 2007. *Wawasan Sejarah Nasional Dan Dunia jilid 1*. Solo : Tiga Serangkai.
- Nasution, A. H. 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung : Disjarah AD.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan implementasi Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Reid, Anthony. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sardjono, Marsadji G.H. 1982. *PDRl Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia*. Jakarta : Tinta Emas.